

***Collaborative Governance* dalam Pengembangan Kawasan Wisata Ghanjaran Desa Ketanpanrame Trawas Kabupaten Mojokerto**

Tri Maharani¹, Siska Dwiky Anggraini², Muhammad Kamil^{3*}

¹²³ Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang

¹²³ Jl. Raya Tlogomas No.246 Malang, Jawa Timur

email: trimaharani866@gmail.com¹, Ichaa.cha002@gmail.com², kamil@umm.ac.id^{3*}

Abstract

This study aims to examine the scope of collaborative governance in the development of the Ghanjaran Park, Ketapanrame Village, Mojokerto Regency. In this study, it is hoped that it can help develop the Ghanjaran Park tourist area in the increasingly rapid tourism competition in Indonesia, especially in Mojokerto Regency. This type of research is qualitative descriptive with a literature study approach that uses secondary data sources, namely, previous research sources, news, the official website of the Mojokerto regency government. The data collection technique with a literature study approach is to examine and collect various sources. The data analysis technique in this study uses collaborative governance theory according to Ansell & Gash, (2007). Collaboration formed in the development of Ghanjaran Park tourism by various actors such as the village government, BUMDes, KUB and the community. The Collaborative Governance process in developing the Ghanjaran Park tourist area has not been optimally implemented, because the people who receive the benefits of this Park are still around 30% and around 70% of the community have not received the benefits, but the Ketapanrame village government continues to strive so that the goal of alleviating poverty can be achieved.

Keywords: *Collaborative Governance; Tourism Village; Participation;*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ruang lingkup Collaborative governance dalam pengembangan kawasan wisata Taman Ghanjaran Desa Ketapanrame Kabupaten Mojokerto. Dalam penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan kawasan wisata Taman Ghanjaran dalam persaingan wisata yang semakin pesat di Indonesia khususnya di Kabupaten Mojokerto. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur yang menggunakan sumber data sekunder yaitu, sumber-sumber penelitian terdahulu, berita, situs resmi pemerintah Kabupaten Mojokerto. Adapun teknik pengumpulan data dengan pendekatan studi literatur adalah dengan menelaah dan mengumpulkan berbagai sumber. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teori Collaborative governance menurut Ansell & Gash. Kolaborasi yang terbentuk dalam pengembangan wisata Taman Ghanjaran oleh berbagai aktor seperti pemerintah desa, BUMDes, KUB dan masyarakat. Proses Collaborative Governance dalam pengembangan kawasan wisata Taman Ghanjaran belum optimal dilaksanakan, karena masyarakat yang menerima manfaat adanya Taman ini masih sekitar 30% dan sekitar 70% masyarakat belum menerima manfaatnya, tetapi pemerintah desa Ketapanrame terus berupaya agar tujuan untuk mengentaskan kemiskinan dapat tercapai.

Keywords: *Collaborative Governance; Desa Wisata; Partisipasi;*

*)Penulis Korespondensi
E-mail : kamil@umm.ac.id

Pembahasan

Pariwisata menjadi salah satu sektor yang mengalami perkembangan yang sangat cepat. Begitu juga dengan sektor pariwisata Indonesia yang terus mengalami perkembangan, yang dibuktikan pada tahun 2010 tercatat sebanyak 7 juta wisatawan dari mancanegara dan terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2015 bertambah sebanyak 10,5 juta wisatawan mancanegara (Pakpahan, 2018). Kesalahan dalam perencanaan pengembangan pariwisata akan mengakibatkan munculnya berbagai macam permasalahan dan konflik kepentingan di antara para stakeholders (Muhaimin, 2019). Begitu juga dengan pengembangan pariwisata yang ada di desa diperlukan perencanaan yang matang dari berbagai pihak.

Pembangunan desa wisata merupakan realisasi dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 60 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, telah memberikan pondasi dasar terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa (Hilman, Y., & Aziz, M. S. A. 2019). (Febrian, 2016). Pengembangan desa wisata merupakan salah satu alternatif yang dipandang sangat strategis untuk menjawab sejumlah isu global dan nasional

terkait dengan pariwisata seperti konservasi lingkungan, pariwisata berkelanjutan, pariwisata berbasis masyarakat, komunitas, serta budaya lokal tersebut.

Isu tentang pembangunan potensi desa berbasis pariwisata semakin gencar terdengar di berbagai daerah. Hal serupa juga terjadi di Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto yang saat ini sedang tren adalah Taman Wisata Ghanjaran yang diresmikan pada tahun 2018 (Muhaimin, 2019). Taman Wisata Ghanjaran mampu mendatangkan pengunjung kisaran 40-50 ribu wisatawan setiap bulannya (Kurniawan, 2021). Konsep Collaborative Governance sebagai sebuah basis alternatif dinilai mampu mewujudkan percepatan dan implementasi kawasan perdesaan (Cordery, 2004; Hartman et al., 2002). Begitu juga dengan pengembangan Kawasan Wisata Ghanjaran ini dikembangkan dengan konsep Collaborative governance yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat Desa Ketapanrame.

Pengelolaan pariwisata berbasis Collaborative governance di Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto mampu menggerakkan partisipasi masyarakat melalui modal sosial kelompok di Taman Ghanjaran. Pada penelitian Ulum & Dewi, (2021) menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan hanya sebatas dukungan ditetapkannya sebagai desa wisata, dukungan yang diberikan berupa solidaritas masyarakat menerima rencana sebelum pengambilan keputusan dilakukan. Pengembangan Desa Wisata Menurut Kirana & Artisa, (2020), menunjukkan bahwa pemerintah melibatkan sektor swasta, akademisi, media dan mendorong partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan. Maka, hal ini menjadi sangat penting untuk mengetahui bagaimana pihak Pemerintah desa melakukan pengelolaan sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan keinginan masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam proses pengembangan wisata Taman Ghanjaran.

Pada penelitian sebelumnya Muhaimin, (2019) menyebutkan bahwa perangkat desa dan masyarakat bekerja sama untuk merealisasikannya dengan membangun Taman Ghanjaran yang menjadi alun-alun Desa Ketapanrame. Dengan adanya Taman Ghanjaran ini diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Ketapanrame. Menurut Tawil, Tawil, Rahmarini, & Salmon, (2021) perlu adanya koordinasi seluruh stakeholder dalam skema kerjasama untuk mengembangkan kawasan wisata Desa untuk mensejahterakan masyarakat. Namun, hal ini tidak sejalan dengan penelitian Tongkotow, Waworundeng, & Kimbal, (2021) yang menunjukkan pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara ternyata kurang melibatkan dan kurang memperhatikan masyarakat desa sehingga, tidak berdampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat dan mutu hidup desa Ratatotok Timur.

Tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis potensi pembangunan kawasan desa wisata berbasis Collaborative Governance dalam pengembangan kawasan wisata Ghanjaran Desa Ketapanrame. Dalam pelaksanaan Pengembangan Kawasan Wisata Ghanjaran Desa Ketapanrame sejumlah aktor terlibat yaitu: Pemerintah Desa; BUMDes; dan masyarakat. Dugaan sementara peneliti, menunjukkan bahwa dalam pembangunan dan pengembangan wisata Taman Ghanjaran memiliki campur tangan dari berbagai aktor salah satunya adalah pemerintah desa yaitu, Kepala Desa Ketapanrame. Peneliti berasumsi bahwa, Kepala Desa memiliki andil yang cukup besar dalam proses mobilisasi warga untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan Taman Ghanjaran. Oleh karena itu, penelitian akan menganalisis collaborative governance dalam pengembangan kawasan wisata Ghanjaran Desa Ketapanrame menggunakan teori Ansell & Gash, (2007).

Metode

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur atau studi kepustakaan. Menurut Zed dalam riset

pustaka tidak hanya untuk langkah awal menyiapkan kerangka penelitian akan tetapi sekaligus memanfaatkan sumber-sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian (Melfianora, 2017). Sumber data pada penelitian ini menggunakan data sekunder melalui penelitian terdahulu, berita, BPS, situs resmi pemerintah Kabupaten Mojokerto. Teknik pengumpulan data dengan pendekatan studi literatur adalah dengan menelaah dan mengumpulkan berbagai sumber data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teori Collaborative governance menurut Ansell & Gash, (2007). Selain itu, untuk menganalisis data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman dalam Usman (2009:85), yang terdiri dari: Pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

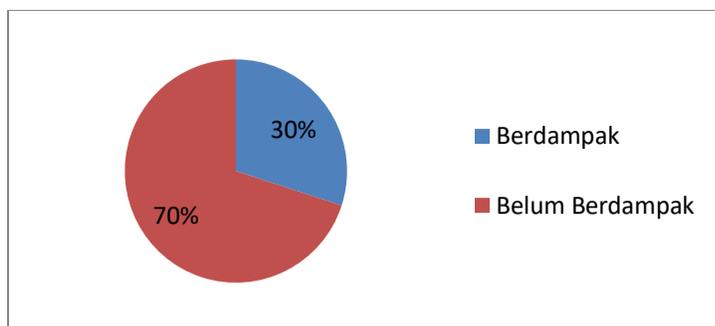
Hasil dan Pembahasan

Dialog Tatap Muka Antara Aktor Kepentingan Dalam Pengembangan Wisata Ghanjaran

Dalam konteks pengembangan kawasan wisata Ghanjaran Desa Ketapanrame ini, proses dialog tatap muka dilakukan dengan pertemuan-pertemuan dalam bentuk rapat dan diskusi bersama para stakeholder yang terkait untuk membahas tentang apa saja yang bisa dilakukan oleh para stakeholder untuk mengembangkan kawasan Wisata Ghanjaran ini. Awal mula Taman Ghanjaran dibentuk pada tahun 2018 dari forum musyawarah antara Kepala Desa, BPD, Lembaga-lembaga yang ada di desa dan tokoh masyarakat (Nyimas & Susanti, 2020). Proses tatap muka ini adalah inti dari proses membangun kepercayaan, saling menghormati, pemahaman bersama, dan komitmen terhadap proses. Terdapat dua kelompok yang menonjol dalam proses pengembangan Taman Ghanjaran hingga menjadi besar seperti saat ini. Kedua kelompok tersebut yaitu BUMDes dan KUB, bentuk partisipasi dalam kelompok KUB karena bermitra dengan Taman Ghanjaran yang berada dalam naungan BUMDes Ketapanrame. Dalam mengembangkan desa wisata melalui pengembangan kawasan wisata Ghanjaran, tidak bisa berjalan sendiri, akan tetapi perlu suatu kolaborasi dari berbagai pihak seperti kerjasama antara masyarakat, pemerintah desa maupun BUMDES, tentunya akan menambah nilai poin keakraban dan kepercayaan di kedua pihak.

Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah Desa Ketapanrame

Berikutnya, setelah proses dialog tatap muka dilakukan, maka komunikasi yang baik diantara kolaborator akan dapat dilakukan. Dampaknya kemudian adalah terbangunnya kepercayaan. Dalam konteks collaborative governance dalam pengembangan kawasan wisata Ghanjaran ini membangun kepercayaan terbentuk melalui proses interaksi yang dilakukan secara intens melalui musyawarah, koordinasi, dan sosialisasi antara masyarakat, pemerintah desa, BUMDes dan KUB. Trust building ini semakin menguat setelah rencana kegiatan yang dirumuskan oleh para stakeholder dapat direalisasikan dan memberikan dampak yang besar bagi pengembangan kawasan wisata Ghanjaran. Pemerintah Desa Ketapanrame menyadari bahwa dalam perencanaan dan pembangunan suatu program akan menemukan pro kontra. Untungnya pemerintah desa tidak menemukan hambatan saat proses pembangunan karena memang Kepala Desa Ketapanrame telah menyampaikan bahwa tanah yang akan dipakai untuk wisata tersebut merupakan hak perangkat desa yang diberikan kepada masyarakat.

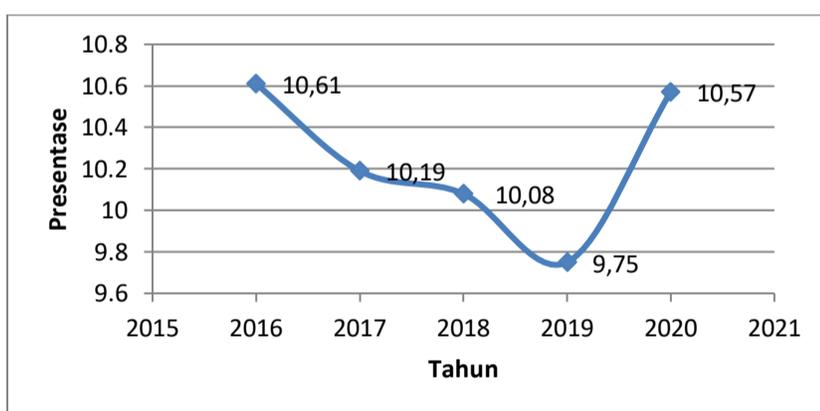


Grafik 1. Dampak Wisata Taman Ghanjaran Terhadap Masyarakat(Sumber: Muhaimin, 2019)

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa perangkat desa hanya mampu memenuhi sekitar 30% masyarakat yang menerima manfaat, sehingga dari 70% ini merasa belum mendapatkan nilai manfaat dengan adanya Taman Ganjaran. Meskipun, saat proses realisasi Taman Ganjaran pemerintah desa menilai tidak ada kendala yang terjadi, namun pro kontra malah terjadi setelah selesai pembangunan. Hal tersebut dikarenakan hanya beberapa masyarakat yang bisa memanfaatkan Taman Ganjaran, untuk saat ini memang taman tersebut dianggap mempunyai fasilitas yang kurang lengkap jika harus menampung seluruh masyarakat Desa Ketapanrame. Sehingga perangkat desa terus mengupayakan agar dari 70% tersebut turut merasakan manfaat dari keberadaan Taman Ganjaran agar masyarakat semakin percaya dengan pemerintah Desa.

Komitmen Pemerintah Desa Ketapanrame Terhadap Proses Pengembangan Wisata Ghanjaran

Proses kolaborasi dalam pengembangan kawasan wisata Ghanjaran ini dalam aspek komitmen terhadap proses yang dilakukan oleh pemerintah desa maupun masyarakat memiliki tujuan yang sama(Mafaza & Setyowati, 2020) yaitu, agar kawasan wisata Ghanjaran semakin berkembang sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran serta dapat meningkatkan pendapatan. Pemerintah desa sengaja tidak menerima investor dari luar yang bermodal besar karena berkeinginan lebih memberikan kesempatan kepada warga lokal untuk berinvestasi dengan konsep kewirausahaan sosial sehingga partisipasi aktif warga dapat dibangkitkan sekaligus mengentaskan kemiskinan secara gotong royong.



Grafik 2. Presentase Penduduk Miskin Kabupaten Mojokerto(Sumber: BPS Kabupaten Mojokerto, 2020)

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa, pada tahun 2016, persentase peduduk miskin di Kabupaten Mojokerto mencapai 115,38 ribu jiwa atau 10,61 persen dari total penduduk. Selanjutnya pada tahun-tahun berikutnya terus mengalami penurunan menjadi 9,75 persen (108,81 ribu jiwa) pada tahun 2019. Pada tahun 2020, mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin menjadi 118,80 ribu jiwa (10,57 persen). Selama rentang periode tersebut angka kemiskinan turun sebesar 0,04 poin, namun penduduk miskin bertambah

sebanyak 4,94 ribu jiwa. Namun, pemerintah Kabupaten Mojokerto terus berupaya untuk menurunkan tingkat kemiskinan salah satunya melalui sektor pariwisata. Seperti halnya di Desa Ketapanrame yang mendirikan desa wisata Taman Ghanjaran yang diresmikan sejak akhir Desember 2018, meskipun yang menerima manfaat masih 30% masyarakat Desa Ketapanrame. Tetapi, pemerintah desa terus berupaya agar 70% masyarakat juga menerima manfaat dengan adanya Taman Ghanjaran agar dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta menurunkan angka kemiskinan secara gotong royong. Hal ini terbukti berdasarkan grafik diatas pada tahun 2019 penduduk miskin Kabupaten Mojokerto mengalami penurunan yaitu menjadi 9,75% dari 10,08% pada tahun 2018, meskipun pada tahun 2020 mengalami peningkatan lagi karena faktor pandemi Covid-19. Dampak dari pandemi ini mengakibatkan tempat pariwisata di Kabupaten Mojokerto salah satunya Taman Ghanjaran tutup selama 3 bulan. Dan dibuka kembali bagi wisatawan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dengan pembatasan kuota pengunjung yaitu, sekitar 50% atau 400 pengunjung dari kapasitas maksimal sekitar 750 pengunjung perhari(radarmojokerto.id, 2020).

Persamaan Pemahaman Antar Aktor Kepentingan Dalam Pengembangan Wisata Ghanjaran

Shared understanding dalam pengembangan kawasan wisata Ghanjaran sudah optimal. Hal tersebut setidaknya dapat dilihat dari wujud dari adanya kolaborasi dalam pengembangan wisata Ghanjaran di Desa Ketapanrame dengan pembagian kerja masing-masing pihak. Pihak pertama yang berperan dalam pengembangan kawasan wisata Ghanjaran ini tentu saja pemerintah Desa. Peran dari pemerintah Desa sendiri tidak jauh dari kebijakan, bagaimana agar pelaksanaan dan pengelolaan pariwisata tersebut dapat berjalan lancar dan sesuai dengan tujuan. Secara garis besar kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah Desa Ketapanrame adalah untuk menunjang pengelolaan pariwisata dan aturan mengenai investasi di daerah wisata. Selain itu, destinasi wisata tidak dapat dibiarkan dan menunggu untuk berkembang sendiri maka, diperlukan adanya strategi- strategi untuk mengembangkan daerah wisata tersebut.

Taman Ghanjaran merupakan bagian dari BUMDes Ketapanrame yang di dalam Taman Ghanjaran terdapat sebuah kelompok bernama KUB yang merupakan wadah bagi warga yang untuk berinvestasi di Taman Ghanjaran, yang mana hasil investasi tersebut akan diimplementasikan dalam bentuk wahana KUB di dalam Taman Ghanjaran. Anggota yang bergabung dalam kelompok tersebut merupakan warga Ketapanrame yang ikut berinvestasi di dalam kelompok. Sedangkan, yang menjadi pengurus merupakan pemilik saham yang berasal dari warga sendiri. Meskipun KUB diolah oleh warga Desa Ketapanrame secara berkelompok, KUB tetap memiliki tanggung jawab terhadap BUMDes dan Pemerintah Desa. Bentuk tanggung jawab tersebut ialah pembayaran sharing sebesar 10% dari pendapatan kotor kepada BUMDes dan laporan pendapatan harian kepada anggota. Sedangkan untuk kepala desa sendiri hanya sekedar mengetahui tanpa campur tangan dalam pengelolaannya(Nyimas & Susanti, 2020).

Hasil Sementara Dengan Adanya Wisata Taman Ghanjaran Desa Ketapanrame

Dalam pengembangan kawasan wisata Ghanjaran melalui collaborative governance, proses Intermediate Outcomes adalah Pemerintah desa sengaja tidak menerima investor dari luar yang bermodal besar karena berkeinginan lebih memberikan kesempatan kepada warga lokal untuk berinvestasi dengan konsep kewirausahaan sosial sehingga partisipasi aktif warga dapat dibangkitkan sekaligus mengentaskan kemiskinan secara gotong royong. Berdasarkan kebijakan tersebut, maka partisipasi masyarakat menjadi lebih tinggi dalam upaya pengembangan kawasan wisata Ghanjaran.

Tabel 1. Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Wisata Ghanjaran

Bentuk Partisipasi Masyarakat	Jumlah
Pelaku usaha	107 Orang
Tenaga Parkir	80 Orang
Karyawan	10 Orang
Pengurus BUMDES	10 Orang
Pegawai KUB	10 Orang
Anggota Investasi	444 Kepala Keluarga

(Sumber: JawaPos.com, 2021)

Berdasarkan tabel diatas Wisata Taman Ghanjaran mampu memberdayakan ratusan warga desa setempat. Masing-masing sebagai pelaku usaha di 107 titik kios dan lapak, 80 tenaga parkir, 10 karyawan, 10 pengurus BUMDes, 10 orang pegawai di KUB, serta 444 kepala keluarga yang menjadi anggota dari investasi. Total yang dilibatkan di unit wisata BUMDes di Ghanjaran dari semua unsur kurang lebih 800 orang. Baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung.

Kesimpulan

Collaborative governance dalam pengembangan kawasan wisata Taman Ghanjaran Desa Ketapanrame adalah sebuah strategi yang disepakati bersama untuk meningkatkan daya saing pariwisata yang semakin banyak yang ada di Kabupaten Mojokerto. Kolaborasi yang terbentuk dalam konteks ini diwujudkan dengan penyelenggaraan sejumlah kegiatan dari masing-masing aktor. Collaborative governance dalam konteks ini dilakukan dengan melibatkan sejumlah aktor diantaranya adalah pemerintah desa, BUMDes, KUB dan masyarakat. Collaborative governance dalam pengembangan kawasan wisata Taman Ghanjaran Desa Ketapanrame belum optimal dilaksanakan karena yang menerima manfaat adanya Taman Ghanjaran ini masih 30% masyarakat saja, tetapi pemerintah desa akan terus berupaya agar 70 % masyarakat Desa Ketapanrame juga dapat merasakan manfaatnya, sehingga dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, upaya yang dilakukan pemerintah desa adalah tidak menerima investor dari luar yang bermodal besar karena berkeinginan lebih memberikan kesempatan kepada warga lokal untuk berinvestasi dengan konsep kewirausahaan sosial sehingga partisipasi aktif warga dapat dibangkitkan sekaligus mengentaskan kemiskinan secara gotong royong.

Ucapan Terimakasih

Terimakasih kepada Program Studi Ilmu Pemeirntahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang atas dukunganya.

Daftar Pustaka

- Ansell, & Gash. (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Adminsitration Research and Theory*.
- BPS Kabupaten Mojokerto. (2020). Profil Kemiskinan Kabupaten Mojokerto Tahun 2020.
- Febrian, R. A. (2016). Collaborative Governance Dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan (Tinjauan Konsep dan Regulasi). *Wedana*, II, 200–208. Retrieved from <http://journal.uir.ac.id/index.php/wedana/article/view/1824> diakses pada tanggal 5 April 2019 pukul 02:55 WIB.

- Hilman, Y., & Aziz, M. S. A. (2019). Partisipasi Masyarakat terhadap Pengembangan Desa Wisata “Watu Rumpuk” Desa Mendak Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun. *Jurnal Kepariwisata: Destinasi, Hospitalitas Dan Perjalanan*, 3(2), 54-66.
- JawaPos.com. (2021). Taman Ghanjaran Trawas di Mojokerto, Gunung dan Wahana Permainan. Retrieved from <https://www.jawapos.com/wisata-dan-kuliner/travelling/17/01/2021/taman-ghanjaran-trawas-di-mojokerto-gunung-dan-wahana-permainan/>
- Kirana, C. A. D., & Artisa, R. A. (2020). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Collaborative Governance di Kota Batu. *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 68–84. <https://doi.org/10.26618/kjap.v6i1.3119>
- Kurniawan, S. (2021, March). Taman Ghanjaran Trawas di Mojokerto, Gunung dan Wahana Permainan. *Jawapos.Com*. Retrieved from <https://www.jawapos.com/wisata-dan-kuliner/travelling/17/01/2021/taman-ghanjaran-trawas-di-mojokerto-gunung-dan-wahana-permainan/>
- Mafaza, A., & Setyowati, K. (2020). Collaborative Governance Dalam Pengembangan Desa Wisata. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(1), 7. <https://doi.org/10.31258/jkp.11.1.p.7-12>
- Melfianora. (2017). *Penulisan Karya Tulis Ilmiah Dengan Studi Literatur*.
- Muhaimin, H. (2019). Tata Kelola Pariwisata Dalam Pengembangan Potensi Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto. *Journal of Governance Innovation*, 1(1), 1–12. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v1i1.296>
- Nyimas, N. I., & Susanti, A. (2020). Partisipasi Masyarakat Pada Community Base Tourism (CBT) Di Taman Ghanjaran (Studi Di Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto). *Mimbar Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 9(2), 148–163.
- Pakpahan, R. (2018). Implementasi prinsip pariwisata berbasis kelompok di Desa Wisata Nglingsgo Yogyakarta. *JUMPA*, 5(1).
- radarmojokerto.id. (2020). Taman Ghanjaran Trawas Dibuka Lagi, Sajikan Ragam Wahana Baru. Retrieved from <https://radarmojokerto.jawapos.com/read/2020/07/05/202630/taman-ghanjaran-trawas-dibuka-lagi-sajikan-ragam-wahana-baru>
- Tawil, M., Tawil, Y. P., Rahmarini, G. M., & Salmon, I. P. P. (2021). Collaborative Governance as a Strategy for Optimizing the Potential of Coastal Areas and Local Tourism : A Study in Tangerang Regency. *International Journal of Social Science and Human Research*, 04(03), 528–535. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v4-i3-36>
- Tongkotow, N. F., Waworundeng, W., & Kimbal, A. (2021). Collaborative Governannace Dalam Pengelolaan Wisata Pantai Lakban di Kecamtan Ratatotok. *Jurnal Governance*, 1(1), 1–11.
- Ulum, S., & Dewi, S. A. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan

Desa Wisata Gampong. Jurnal Manajemen Publik & Kebijakan Publik (JMPKP), 3(1), 14-24. <https://doi.org/10.36085/jmpkp.v3i1.1408>